

MEMBANGUN KONSTRUKSI IDEAL RELASI MUHAMMADIYAH DAN POLITIK

Sudarno Shobron dan Marpuji Ali

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Political world is tempting for it's players, because there is a variety of materials and power devolution. This makes a lot of good organizations and religious communities joined in it. But Muhammadiyah with smart choices, choose not to enter politics directly due to incompatible with the purpose of establishment of the Muhammadiyah.

This paper is interesting because of the peeling reasons why Muhammadiyah keep a distance from politics, that it's based (a) in accordance with Khittah tip of view, Surabaya, Denpasar, Muhammadiyah still do not have organizational relationships with all political parties. (B) Muhammadiyah must put itself as a moral force, the freedom to run a cultural function to perform da'wah amar nahi munkar to anyone and any political institution. (C) Muhammadiyah established itself as a civil Islam to be a balancing force for high state agencies, whether executive, legislative and judiciary. (D) The head of Muhammadiyah in all levels still have to have local wisdom, to continue to support local government policies that lead to acceleration of Muhammadiyah purposes.

Key words: *relationships, politics, Muhammadiyah.*

كان الميدان السياسى يدفع فاعليها ان يحبوه حبا، لأنه يعد مالا وسلطة -
ومالت عدة الجمعيات. اجتماعية كانت ام دينية - ورفضت الجمعية المحمدية
ان تميل إليه خاصة الى الحزب السياسى، لأن الحزب السياسى لا يوافق هدف
الجمعية المحمدية.
وستبحث هذه المقالة الرائفة العوامل التى تدفع الجمعة المحمدية ان تبتعد من
الحزب السياسى، وذلك يؤسس على عدة أمور، منها:
١. الحطة المحمدية التى قررت باوجنج فندانج، وسورابيا وندناسر، إن الجمعية
المحمدية رفضت أن تدخل اى حزب سياسى.

ج. أثبتت الجمعية المحمدية أنها جمعية إسلامية التي توازن الطاقات الحكومية كطاقة المجلس التنفيذي، طاقة الهيئة الشرعية، وطاقة النظام القضائي.
 د. لابد لسائر أئمة الجمعية المحمدية ان ينالوا قراراتها المحلية ليناصروا نظم الحكومة الإقليمية ليستطيعوا الوصول الى أهداف هذه الجمعية المحمدية التي قد قررت من قبل.

الألفاظ الرئيسية: الصلة، السياسة، المحمدية.

PENDAHULUAN

Pernyataan A.Mukti Ali dalam memberikan pengantar buku Mitsuo Nakamura,¹ bahwa Muhammadiyah itu memiliki banyak wajah (*dzu wujuh-multiface*) tidaklah salah, karena dipandang dari sudut manapun wajah Muhammadiyah sangat jelas kelihatan. Dipandang dari sudut pendidikan, tidak ada keraguan sedikitpun keterlibatan Muhammadiyah dalam mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan, bahkan Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di dunia yang memiliki lembaga pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi tersebar di seluruh wilayah Indonesia.² Dilihat dari sudut sosial, Muhammadiyah memiliki panti asuhan dan santunan berjumlah 330 yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Dilihat dari

sudut kesehatan, Muhammadiyah memiliki 345 layanan kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit PKU, Klinik Kesehatan, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Poliklinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Dilihat dari sudut ekonomi, Muhammadiyah memiliki andil dalam perkembangan perekonomian Indonesia dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan, misalnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ada 19 buah, Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) ada 190 buah, dan Koperasi Muhammadiyah ada 808 buah.³ Begitu juga kalau Muhammadiyah dilihat dari sudut politik, wajah Muhammadiyah juga berwarna politik, walaupun sejak berdiri sampai saat ini Muhammadiyah belum pernah menjadi partai politik. Namun dalam sejarah perjalanan Muham-

¹ Mitsuo Nakamura. *The Crescent Aries Over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in Central Javanes Town*. New York: Cornell University, 1976.

² Data jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah pada tahun 2005 berjumlah 1132 Sekolah Dasar, 1769 Madrasah Ibtidaiyah, 1184 SMP, 534 MTs, 511 SMA, 263 SMK, 172 Madrasah Aliyah, 67 Pondok Pesantren, 55 Akademi, 4 Politeknik, 70 Sekolah Tinggi, dan 36 Universitas, sehingga jumlah keseluruhan ada 5797 lembaga pendidikan. Periksa *Profil Muhammadiyah 2005*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, hlm. viii.

³ *Ibid*.

madiyah pernah bersinggungan bahkan terjun dalam politik praktis, serta ikut membidani lahirnya beberapa partai politik, dan mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yang bermuatan politis.

Muhammadiyah dan politik⁴ merupakan dua wilayah yang berbeda, Muhammadiyah sebagai *civil Islam*⁵ atau *Islamic civil society* bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sementara politik atau *political society*⁶ bergerak dalam bidang *power* (kekuasaan), *state* (Negara) dan memiliki kepentingan-kepentingan untuk melakukan *hegemony* terhadap kekuasaan yang ada. Orientasi dari politik adalah *power* (kekuasaan), sementara *civil Islam* orientasinya adalah *change* (perubahan) yang dilakukan secara kultural. Dakwah Muhammadiyah memiliki sasaran individual dan masyarakat. Individual dalam bentuk tajdid bagi yang telah beragama Islam dan

ajakan untuk memeluk Islam bagi yang belum Islam. Sedangkan masyarakat dalam bentuk perbaikan kearah yang lebih baik. Masyarakat disini misalnya masyarakat ekonomi (*economic society*), masyarakat politik (*political society*), masyarakat seni (*art society*), dan lain sebagainya. Dari sinilah dapat dipahami mengapa dalam sejarah Muhammadiyah belum pernah merubah dirinya dari organisasi keagamaan menjadi partai politik?. Jawaban sederhananya bahwa politik bagi Muhammadiyah menjadi salah satu dari lahan dakwah, maka kalau Muhammadiyah terjun dalam bidang politik praktis berarti mengecilkan peran dakwah Muhammadiyah. Ini satu pilihan yang **cerdas** dan **antisipatif** Muhammadiyah ke depan, bahkan menjadikan pilihan yang **unik**.

Pilihan yang **cerdas**, karena dengan pilihan itu Muhammadiyah dalam sejarah panjangnya sejak

⁴ Periksa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam Bab I pasal 1, bahwa yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Menurut Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000, hlm. 6, menyatakan bahwa yang dimaksud *civil Islam* adalah kelompok Islam non-partai yang memiliki potensi besar dan peran signifikan dalam proses menuju masyarakat demokratis. Secara kelembagaan kelompok *civil Islam* mengambil bentuk organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, al-Irsyad, dan organisasi sejenis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *civil society* dan atau *civil Islam* yang mestinya menjaga jarak dengan negara, kasus di Indonesia tidak terjadi, karena justru tokoh-tokoh kunci dalam *civil Islam*, yakni Abdurrahman Wahid dan Amien Rais masuk dalam episentrum kekuasaan.

⁶ Istilah *political society* dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*) telah menerima suatu pola hubungan dan pergaulan bersama.

berdiri (1912) hingga saat ini (2010) Muhammadiyah tetap eksis, berkembang dan tidak ada konflik internal yang memecah belah keutuhan dan kesatuan pimpinan/tokoh dan warga Muhammadiyah. **Antisipatif**, dengan pemikiran jauh ke depan, Muhammadiyah telah meletakkan dasar-dasar berpikir dalam berpolitik atau keterlibatannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak harus menjadi partai politik, namun eloknya Muhammadiyah bebas bermain politik. **Keunikannya**, karena Muhammadiyah memiliki massa riil yang jumlahnya jutaan, dan ini menjadi daya dukung dalam melakukan kalkulasi politik tapi mengapa ini tidak menjadi alasan bagi Muhammadiyah berubah ke partai politik?. Padahal banyak organisasi yang tidak memiliki anggota sebesar Muhammadiyah, mereka sangat tertarik mendirikan partai politik atau terjun ke politik praktis. Memang tidak dipungkiri bahwa *power* (kekuasaan) dapat dijadikan media untuk melakukan perbaikan-perbaikan bangsa. Bukankah hadis Rasulullah saw mendorong untuk melakukan perubahan melalui kekuasaan (*falyughayyir biyadihi*)?.⁷ Kalau begitu, Muhammadiyah memilih jalur struktural atau kultural?

Untuk melakukan perubahan masyarakat, memang tidak hanya lewat kekuasaan atau struktural saja, melainkan juga dapat lewat non-kekuasaan atau yang disebut kultural. Hal ini dapat dilihat dari rumusan tujuan Muhammadiyah, yakni “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Rumusan ini secara jelas yang akan dirubah oleh Muhammadiyah adalah masyarakat yakni terwujudnya masyarakat Islam, bukan merubah bentuk Negara Republik menjadi Negara Islam (*ad-Daulah al-Islamiyah*), sebagaimana yang dicita-cita oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung sistem khilafah.⁸ Memang untuk melakukan perubahan masyarakat dapat dengan jalur struktural, untuk itu diperlukan media yakni politik. Tetapi kenyataannya, sejak orde lama sampai sekarang, peran partai politik dalam melakukan perubahan belum menunjukkan hasil. Partai politik sibuk dengan persoalan internalnya sendiri-sendiri, sehingga tidak memiliki energy untuk melakukan perubahan masyarakat yang membawa kesejahteraan rakyat. Beban hidup masyarakat bukan semakin ringan, sebaliknya justru

⁷ ()

“Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan, kalau tiak mampu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan, kalau tidak mampu dengan lisan, maka rubahlah dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman.

⁸ Lihat Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta: HTI Press, 2009). Lihat juga Syaikh ‘Ali Belhaj, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah: Kewajiban Terbesar dalam Islam*, terj.: M.Shiddiq al-Jawi, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008).

semakin berat, karena terus harga kebutuhan hidup terus merangkak naik. Tarif Dasar Listrik naek, elpiji harga bertambah, telephon ganti harganya, belum perusahaan air minum yang terus menyesuaikan harga.

Walaupun Muhammadiyah belum pernah menjadi partai politik, bukan berarti Muhammadiyah tidak berpolitik. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah tidak pernah lepas dari persoalan politik, bahkan sering ikut serta membidani lahirnya partai politik Islam, misalnya MIAI, Masyumi, Parmusi, dan Sekber Golkar. Bahkan pada era reformasi sekarang ini ada bukti kongkrit bahwa Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari politik praktis adalah, berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Matahari Bangsa (PMB). Kedua partai politik yang lahir dan didukung oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah bahkan lewat forum resmi Muhammadiyah. PAN lahir tidak dapat dilepaskan dari hasil Tanwir Muhammadiyah Semarang, sedangkan PMB lahir dari rekomendasi Tanwir Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa Mu-

hammadiyah tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah politik praktis. Kalau memisahkan Muhammadiyah dari politik justru ahistoris.⁹ Muhammadiyah juga memiliki kecenderungan berpolitik selagi ada kesempatan, seperti halnya Nahdhatul Ulama (NU), yang ingin meraih kekuasaan, baik lewat partai politik¹⁰ untuk dapat menguasai lembaga legislatif, dan eksekutif. Kecenderungan berpolitik Muhammadiyah misalnya dalam Pemilu 2004 yang lalu, mendukung Amien Rais untuk menjadi calon presiden berdampingan dengan Siswono sebagai wakil presiden, dan NU mendukung Ketua PBNU yakni K.H. Hasyim Muzadi,¹¹ mendampingi Megawati.

Kedekatan Muhammadiyah dengan politik dapat dimaknai sebagai usaha sistematis dan terstruktur untuk dapat memberikan usulan-usulan berbagai hal yang membawa kemaslahatan umat. Lebih-lebih kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan *al-qur'an* dan *al-Sunnah al-Maqbulah*, misalnya menjadikan

⁹ Lihat Ma'mun Murod, Memisahkan Muhammadiyah dari Politik: Ahistoris, dalam <http://www.pmb.or.id>

¹⁰ Selepas dari Masyumi NU menjadi partai politik yang ikut serta dalam pemilu pertama tahun 1955, meraih suara 18,4 %, dengan basis massa yang kuat di tiga daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1999, hlm. 95.

¹¹ Pada Pemilihan Umum tahun 2004 yang lalu, Hasyim Muzadi (ketua PB NU) maju menjadi wakil presiden mendampingi Megawati yang menjadi calon presiden, namun gagal. Koalisi NU yang santri dan PDIP yang abangan – nasionalis belum dapat menarik simpati masyarakat untuk memilihnya, kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Yusuf Kalla (YK) yang diukung oleh Partai Demokrat dan Golkar. Pada putaran pemilihan yang kedua, PBB dan PKS mendukung.

pancasila sebagai asas tunggal,¹² Muhammadiyah wajib menolaknya. Hal ini sesuai dengan khittah perjuangan Muhammadiyah yang terdapat dalam Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah point ke 3, yakni:

“Hanya hukum Allah jang sebenar-benarnjalah satu-satunya jang dapat didjadikan sendi untuk membentuk pribadi jang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masjarakat) dalam menudju hidup bahagia dan sedjahtera jang haqiqi, di dunia dan achirat”.¹³

Artinya kalau tatanan kehidupan ini diatur oleh hukum selain hukum Allah, jelas tidak akan membawa kemaslahatan, kesejah-

teraan dan keadilan. Syareat Islam harus diletakkan diatas semua produk hukum, baik itu undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (kepres), instruksi presiden (inpres), maupun peraturan daerah (perda). Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut merupakan langkah politik struktural, karena semua produk hukum tidak boleh bertentangan dengan rujukan utama Muhammadiyah. Sedangkan langkah politik kultural Muhammadiyah dilakakukan dengan dakwah amar makruf nahi munkar. Konsep dakwah kultural¹⁴ merupakan usaha Muhammadiyah untuk melebarkan sayap dakwahnya tidak hanya di daerah-daerah

¹² Muhammadiyah sangat keras usahanya untuk menggolkan pikiran-pikirannya masuk kedalam rancangan Undang-Undang Perkawinan yang semula disiapkan drafnya oleh CSIS. Juga usaha Muhammadiyah untuk menggagalkan asas tunggal bagi organisasi massa, dengan serius PP Muhammadiyah melakukan lobby-lobby dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan anggota DPR-MPR. Lihat Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Asas Tunggal*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

¹³ M.Djindar Tamimy, *Pendjelasan Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah*. Jogjakarta: Sekretariat P.P. Muhammadiyah, 1970, hlm. 11. Lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat yang sejahtera, aman, damai makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.

¹⁴ Mengenai konsep dakwah kultural lihat PP Muhammadiyah, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*: Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000. Kalau tanggapan terhadap dakwah kultural lihat Moeslim Abdurrahman (ed.), *Muhammadiyah sebagai Tenda Kultural*. Jakarta: Ideo Press – Ma’arif Institute, 2003. Dalam buku ini ada 14 tulisan yang ditulis oleh para aktivis muda Muhammadiyah yang menyoroti tentang dakwah kultural Muhammadiyah, yakni (1) Ber-Islam Secara Kulutral: Sebuah Pengantar; (2) Dari Dogmatis ke Kultural: Refleksi Kritis Dakwah Muhammadiyah; (3) Membendung Arus Formalisme; (4) Problem Potensial Dakwah Kultural Muhammadiyah: Perspektif Komunikasi Antarbudaya; (5) Dakwah Kultural dan Prospek Dakwah Muhammadiyah; (6) Dakwah Sebagai Strategi Kebudayaan; (7) Dakwah Kultural VS Supremasi Islam Murni; (8) Dakwah Kultural dan Posisi Perempuan di Indonesia; (9) Kurma dan Belimbing: Pendekatan Kultural dalam Tafsir al-Qur’an; (10) Dakwah Kultural: Revisi dalam Keagamaan Muhammadiyah; (11) Berdakwah di Era Transformasi; (12) Ikhtiar Membangun Kesadaran Kolektif Grass Roots: Kritik Apresiasi Kultural Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Masyarakat; (13) Sajak: Elegi Anak Muhammadiyah; dan (14) Dakwah Kultural: Kritik Diri atau Reafirmasi.

yang telah mapan keislamannya, tapi harus juga menjangkau daerah-daerah yang memiliki budaya lokal tertentu dan minim pemahaman keislamannya. Ini adalah langkah politik dakwah Muhammadiyah.

Jalur struktural dan kultural dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan adalah sah-sah saja dan itu merupakan pilihan, karena keduanya sangat dibutuhkan. Hanya saja dalam sejarah Muhammadiyah yang terbentang sejak zaman kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai orde reformasi, Muhammadiyah menorehkan tinta keberhasilannya bukan dalam jalur struktural kekuasaan, melainkan dalam jalur kultural. Namun Muhammadiyah juga tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dalam persoalan politik bangsa. Tercatat dalam sejarah, bahwa Muhammadiyah ikut terlibat secara langsung dalam merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan menentukan dasar dan konstitusi negara,¹⁵ ikut membangun bahkan ikut serta mendorong jatuhnya kekuasaan Orde Baru, serta mengawal Era Reformasi.

Kalau Muhammadiyah mengambil jalur kultural, hal ini sesuai dengan tujuan persyarikatan, yakni "...*terwujudnya masyarakat Islam...*", bukan negara Islam atau Daulah Islamiyah. Kalau yang akan diraih adalah kekuasaan atau *power*, satu-satunya media yang efektif dan

prosedural adalah menjadi partai politik, bertarung lewat pemilu untuk dapat menguasai lembaga legislatif, dan menentukan calon presiden untuk bertarung dengan capres lain dalam pemilu. Kalau dalam pemilu legislatif dan presiden menang, maka Muhammadiyah akan menjadi pemegang kekuasaan di Indonesia, dan ini sangat memudahkan sekali untuk melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar. Tetapi apakah pilihan jalur struktural itu bagi Muhammadiyah sesuai dengan khittah dan tujuan Muhammadiyah? Dan apakah tidak menimbulkan konflik internal, mengingat politik itu pada esensinya adalah *power* (kekuasaan) dan setiap orang dipenuhi ambisi untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu untuk ke depan, Muhammadiyah akan tetap eksis dan dapat memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara ini, kalau Muhammadiyah tetap berkhidmat dalam jalurnya yang selama ini ditekuni dan telah teruji oleh sejarah yakni jalur kultural.

Walaupun memilih jalur kultural, Muhammadiyah dan bentangan sejarahnya sering bersinggungan dengan politik praktis, bahkan ikut serta membidani lahirnya beberapa partai politik sejak Orde Lama sampai Reformasi. Partai politik yang dibidani oleh Muhammadiyah adalah MIAI, Masyumi, Parmusi, PAN dan PMB. Dari keterlibatannya

¹⁵ Lihat Sudarno Shobron (ed.), *Studi Kemuhmadiyah*. Surakarta: LPID UMS, 2008.

ini, maka Muhammadiyah sering dicap ambigu dalam politik.

AMBIGUITAS MUHAMMADIYAH

Dalam bidang politik, sering dipertanyakan sikap ambiguitas Muhammadiyah sewaktu menghadapi problem politik, satu sisi Muhammadiyah memiliki sikap yang tegas untuk tidak terlibat dengan politik praktis, sisi yang lain Muhammadiyah baik secara kelembagaan maupun pribadi pimpinan memberikan dukungan terhadap kader-kadernya untuk maju menjadi pimpinan bangsa, baik sebagai calon presiden, menteri maupun anggota legislatif, juga dalam mendirikan partai politik. Contoh sikap tegas Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam politik praktis adalah yang terjadi di Jawa Tengah misalnya, tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2008. Pejabat sementara (Pjs) Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama (NU) Abu Hapsin, menginstruksikan kepada warga NU Jawa Tengah untuk mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur, Bambang Sadono

dan Muhammad Adnan. Instruksi dari ketua NU ini dipersoalkan oleh Ketua Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Masruri Mughni. Begitu juga Ketua DPW PKB, Yusuf Chudlori mengecam langkah yang diambil oleh Abu Hapsin.¹⁶ Tetapi seorang tokoh muslimat, Hj. Choiriyah Muhoyyar SH, dalam sebuah iklan memberikan dukungan kepada Bambang-Adnan.¹⁷ Perang urat saraf secara terbuka lewat media diantara para tokoh NU sudah sangat jelas, ini tidak lepas dari sepe-rangkat kepentingan yang diagen-dakan masing-masing tokoh. Kalau merasa dirugikan, mereka akan kontra, tetapi kalau diuntungkan, mereka akan mendukung. Hal ini berbeda dengan Muhammadiyah, yang tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk mendukung salah satu cagub-cawagub, walaupun pada Pilkada Jawa Tengah ada kader Muhammadiyah yang menjadi cawagub mendampingi cagub, yakni Drs. H. Abdurrozaq Rais, MM (adik kandung M. Amien Rais, dan kakak kandung A. Dahlan Rais) yang mendampingi Ir. H. Tamzil, MT,¹⁸ pada pilkada yang dilaksanakan

¹⁶ Lihat *Solo Pos*, Selasa Wage 10 Juni 2008, hlm. 12. Lebih lanjut dikatakan oleh Yusuf Chudlori, bahwa "Kami banyak menerima laporan dari daerah-daerah tentang mobilisasi struktur NU untuk menyukseskan Bambang Sadono-Adnan. Di Purworejo kami mendapati gambar pasangan Bambang-Adnan yang di kanan dan kirinya diberi logo NU". Hal ini menunjukkan bahwa Bambang-Adnan diusung NU, padahal keduanya dicalonkan oleh Golkar, meskipun Adnan sebelumnya ketua PWNU Jawa Tengah.

¹⁷ Lihat *Solo Pos*, Rabu Pahing 18 Juni 2008, hlm. 9. Lebih lanjut dikatakan "insya Allah kita punya pemimpin yang amanah, perhatian pada kaum perempuan dan wong cilik".

¹⁸ Muhammadiyah Jawa Tengah memiliki 35 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), 509 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), dan 700 Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM). Lihat juga di <http://www.jaknews.com>.

pada tanggal 22 Juni 2008 yang lalu.¹⁹ Sehingga tidak ada pro dan kontra atau polemik pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah tentang siapa yang akan didukung, bahkan dengan partai politik yang mengklaim mendapat dukungan dari warga Muhammadiyah sekalipun, yakni PAN dan PMB. Walaupun sesungguhnya sudah diketahui bahwa massa Muhammadiyah sangat besar, buktinya pada pengajian cabang ranting se Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2008 di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Semarang, warga Muhammadiyah yang datang hampir 30 ribu jamaah. Hal ini sungguh sangat menggiurkan bagi para calon gubernur dan wakil gubernur untuk mendekati dan merayu Muhammadiyah agar warganya digiring mendukung dan memilihnya. Namun Muhammadiyah Jawa Tengah tetap konsisten pada khittah perjuangan-

nya, bahwa tidak akan mengeluarkan instruksi kepada warga Muhammadiyah Jawa Tengah untuk memilih salah satu calon. Mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan ummat pada umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya. Sikap ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 61/KEO/I.)/B/2008 tentang Pilkada, bahwa pimpinan persyarikatan beserta Majelis, Lembaga dan Ortom, Amal Usaha dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah tidak boleh memberikan dukungan atau menolak calon gubernur-wakil gubernur, calon walikota-wakil walikota, calon bupati-wakil bupati dalam pilkada baik langsung maupun melalui kerjasama dengan partai politik.²⁰ Keputusan ini berlaku mengikat bagi

¹⁹ Dalam Pilkada yang pertama dilakukan di Jawa Tengah ada 5 calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Bambang Sadono-Adanan (Golkar), Agus Suyitno-Khoiq (PKB), Sukawi-Sudharto (Demokrat dan PKS), Bibit Waluyo-Rustriningsih (PDI Perjuangan), Tamzil-Rozaq Rais (PPP dan PAN), yang diakhirinya dimenangkan oleh pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam satu kali putaran.

²⁰ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 61/KEP/I.O/B/2008 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Menghadapi Pemilihan Kepada Daerah. Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan, ditetapkan di Yogyakarta, tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1429 H/25 Maret 2008. Ada 9 butir isi dari SK tersebut, yakni 1. Pimpinan persyarikatan beserta Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah tidak diperbolehkan (a) melibatkan organisasi/persyarikatan untuk kepentingan mendukung atau menolak calon-calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati dan jabatan-jabatan publik/politik lainnya dalam kegiatan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di setiap tingkatan, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan partai politik dan/atau tim sukses setiap calon dalam Pilkada; (b) menggunakan lambang/symbol, fasilitas, dana dan infrastruktur yang dimiliki Persyarikatan dalam kegiatan Pilkada dimaksud. 2. Jika diperlukan demi kemaslahatan umat dan masyarakat luas, Pimpinan Persyarikatan (Wilayah atau Daerah) diperbolehkan untuk memberikan kriteria moral dan kualitas yang berkaitan dengan kelayakan calon pejabat pemerintah yang dicalonkan sebagai bentuk dari panggilan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan secara santun, cerdas, terorganisasi, dan mengutamakan kemaslahatan umum

pimpinan persyarikatan, sehingga menjadi jelas apa yang akan dilakukan oleh pimpinan persyarikatan dalam menghadapi pilkada. Walaupun Muhammadiyah mempunyai sikap yang tegas berkenaan dengan politik praktis, namun kalau dicermati point-point dalam Surat Keputusan tersebut mengandung pandangan dalam berpolitik praktis.

Dalam menghadapi politik praktis antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sama-sama organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki beberapa perbedaan, dan sering sikap politik kedua organisasi Islam ini sulit untuk disatukan. Namun bukan berarti tidak dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan

serta bebas dari kepentingan-kepentingan pribadi. 3. Kualifikasi dan kriteria kepemimpinan yang sejalan dengan pandangan Muhammadiyah ialah sebagai berikut: (a) Integritas diri: beriman dan bertaqwa, memiliki kekuatan moral dan intelektual; serta menjadi uswah hasanah (teladan yang baik) sebagai pemimpin publik; (b) Kapabilitas: kemampuan memimpin dan mampu menggalang serta mengelola keberagaman/kemajemukan menjadi kekuatan yang sinergis; (c) Populis: berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat; (d) Visioner: memiliki visi strategis untuk membawa bangsa/rakyat keluar dari krisis dan menuju kemajuan dengan bertumpu pada kemampuan sendiri (mandiri); (e) Berjiwa negarawan, mampu membuka proses regenerasi kepemimpinan yang baik, dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri/kelompoknya; (f) Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai lingkungan di dalam dan luar; (g) Berjiwa reformis, yakni memiliki komitmen untuk menjalankan reformasi di berbagai bidang kehidupan; (h) Bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan membangun *good governance*; (i) Menyelamatkan lingkungan hidup dan mampu mengelola sumberdaya alam dengan sebaik-baiknya serta amanah; (j) Mampu memimpin dan membawa wilayah/ daerah setempat ke kondisi yang lebih baik dan lebih maju di berbagai bidang kehidupan; dan (k) Mendukung atau minimal tidak antipati/ bersikap negatif terhadap Muhammadiyah. 4. Apabila terdapat Anggota Pimpinan Persyarikatan (PWM/PDM/PCM/PRM) dan pimpinan Amal Usaha yang menjadi Calon dalam Pilkada maka yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pimpinan Persyarikatan di atasnya atau yang mengangkatnya serta harus melepaskan diri dari jabatannya. 5. Apabila terdapat anggota Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya dalam lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota Tim Sukses Calon dalam Pilkada maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan dari jabatannya sampai selesai kegiatan Pilkada. 6. Kepada seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan maupun warga Muhammadiyah diminta untuk ikut mendorong dan menyukseskan Pilkada yang jujur, bersih, demokratis, dan memihak pada kepentingan rakyat, serta dapat mencegah dan menjauhkan diri dari praktik-praktik politik uang dan hal-hal yang melanggar norma-norma agama dalam pemilihan kepala daerah tersebut. 7. Kepada anggota/warga Muhammadiyah dianjurkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya secara cerdas, kritis, dan mempertimbangkan kepentingan/kemashlahatan Persyarikatan, umat, dan masyarakat di wilayah/daerah yang bersangkutan. 8. Apabila terdapat masalah-masalah darurat yang bersifat situasional yang dihadapi Muhammadiyah setempat yang terkait dengan Pilkada tersebut maka Pimpinan Persyarikatan di daerah tersebut harus berkordinasi/berkonsultasi/berkomunikasi dengan Pimpinan Persyarikatan di atasnya. 9. Kebijakan/ ketentuan ini berlaku hingga dicabut atau diganti oleh kebijakan/keputusan lain yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

kenegaraan.²¹ Bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini, tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah dan NU, dan keduanya memiliki kontribusi yang besar dalam membangun negara sejak meraih kemerdekaan, meletakkan konstitusi negara, melawan komunisme, mengisi pembangunan, menumbangkan orde baru, sampai lahirnya era reformasi. Kedua organisasi besar ini memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa, maka keterlibatannya dalam memecahkan masalah bangsa dan negara, termasuk pergantian pimpinan menjadi perhatian serius. Logika inilah yang dijadikan dasar Muhammadiyah mengambil sikap mendukung secara kelembagaan terhadap kader terbaiknya untuk maju menjadi calon pemimpin bangsa. Hal itu juga

sebagai contoh kasus yang menunjukkan bahwa posisi Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari politik. Begitu juga kalau dilihat keterlibatan Muhammadiyah dan tokohnya dalam ikut serta memberikan dukungan terhadap kelahiran PAN dan PMB, sering dicandra menunjukkan ambiguitas Muhammadiyah dalam menghadapi politik.

Sekedar mengingatkan, kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Matahari Bangsa (PMB) tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah. PAN lahir dari rekomendasi Sidang Tanwir²² Muhammadiyah di Semarang pada tanggal 5-7 Juli 1998, yang intinya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pada waktu Ketuanya dipe-

²¹ Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan pentingnya dua organisasi, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bersinergi, berkolaborasi, agar terhindari dari pengaruh politik. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jamaah NU dan Muhammadiyah untuk menjadi penerang, pelita yang menyinari kehidupan umat dan Bangsa. Hal ini dikatakan pada saat acara halal bi halal di Gedung Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization di Jakarta, Selasa 18 Desember 2007. Lihat <http://www.antara.co.id>. Bahkan Fachry Aly menyatakan kalau Muhammadiyah dan NU memiliki peranan besar dalam ikut serta menata kehidupan berbangsa dan benegara. Lihat Fachry Aly, Islam dan Pemberdayaan Poltik Umat: Telaah Peran NU dan Muhammadiyah, dalam A.Syafii Ma'arif dkk., *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*. Yogyakarta: MTT-PP Muhammadiyah-UAD Press, 2005, hlm.215. Periksa juga, Ma'mun Murod al-Barbasy dkk (ed.), *Muhammadiyah-NU Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan*. Malang: UMM Press, 2004.

²² Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Bab IX, pasal 24 dijelaskan bahwa yang dimasud Tanwir adalah permusyawatan dalam Muhammadiyah dibawah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas nama tanggungjawab Pimpinan Pusat. Sedangkan dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Bab 23 dijelaskan tentang agenda Tanwir, yakni (1) laporan pimpinan pusat; (2) Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir; (3) masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan; (4) masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar; dan (5) Usul-usul. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah dan Suara Muhammadiyah, 2005, hlm. 18 dan 51.

gang oleh Amien Rais, untuk melakukan ijtihad politik melakukan ijtihad politik²³. Rekomendasi ini didasarkan pada perkembangan sosial politik di tanah air yang tidak bisa begitu saja diabaikan, lebih-lebih sang ketua sudah terlanjur basah masuk dalam gelanggang politik praktis, dan mendapat dukungan dari kalangan Pemuda Muhammadiyah dalam wujud rekomendasi dalam Muktamar di Pekan Baru 1-4 Juli 1998, yang mengikhlaskan Amien Rais terjun dalam politik praktis²⁴. Tidak itu saja, Pemuda Muhammadiyah juga mengikhlaskan kalau bangsa Indonesia menghendaki Amien Rais memegang jabatan di pemerintah.²⁵

Dengan rekomendasi untuk melakukan ijtihad politik, Amien Rais ingin mengkondisikan warga Muhammadiyah menerima kehadiran partai politik baru dengan mengusulkan wakil ketua PP Muhammadiyah, Prof.Dr. Ahmad Syafii Ma'arif untuk menjadi ketua partai. Usulan dari ketuanya itu ditolak, karena merasa dirinya tidak memiliki ketertarikan terjun dalam politik praktis. Namun Syafii berpe-

san bahwa partai yang akan didirikan itu nanti lebih baik bersifat terbuka bercirikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan tujuan pokok untuk mendorong proses reformasi.²⁶ Ijtihad politik Muhammadiyah kemudian memperoleh legitimasi ketika sidang Pleno yang diperluas, diikuti oleh anggota PP Muhammadiyah dan ketua-ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1998 di Jakarta. Sidang Pleno memutuskan, yakni memberikan ijin kepada M.Amien Rais untuk mendirikan partai politik dan kemudian melepaskan kedudukannya sebagai ketua PP Muhammadiyah untuk digantikan oleh Wakil Ketua, sebagai pejabat ketua PP Muhammadiyah hingga disahkan dalam sidang Tanwir.²⁷ Keputusan ini menunjukkan istiqomahnya Muhammadiyah untuk tidak terjun dalam panggung politik praktis secara langsung. Sebab kalau Muhammadiyah menjadi partai politik, dilihat dari masalah dan mudharat akan lebih berat mudharatnya. Alasannya; (1) dalam dunia politik itu penuh dengan intrik,

²³ Dalam Sidang Tanwir tersebut para ketua PW Muhammadiyah se Indonesia sepakat tetap mempertahankan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, dan tidak berniat untuk merubah menjadi partai politik. Walaupun demikian, sidang menyepakati orang-orang Muhammadiyah yang berniat dan berbakat di bidang politik dipersilahkan membentuk partai politik baru atau bergabung dengan partai politik lain. Lihat *Suara Merdeka*, 7 Juli 1998.

²⁴ Lihat *Republika*, 7 Juli 1998.

²⁵ Lihat *Kedaulatan Rakyat*, 7 Juli 1998.

²⁶ Lihat *Kedaulatan Rakyat*, 8 Juli 1998.

²⁷ Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang, 2000, hlm. 213.

konflik kepentingan pribadi; (2) amal usaha Muhammadiyah yang selama ini berkembang dengan baik, tidak akan mendapat perhatian penuh; (3) dakwah Muhammadiyah akan terbengkelai, karena energi dikuras untuk mengurus politik; (4) lahan dakwah Muhammadiyah semakin menyempit, karena apabila berdakwah ke luar akan dicurigai bermuatan politis; dan (5) ukhuwah Muhammadiyah akan terganggu karena didominasi kepentingan politik.

Setelah mengantongi ijin dari Muhammadiyah, M. Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional

(PAN) yang dideklarasikan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus 1998 di Senayan Jakarta.²⁸ Dilihat dari aspek historisitasnya, jelas Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dapat dilepaskan dari peran Muhammadiyah, bahkan PAN lahir secara resmi dari “gua garba”nya Muhammadiyah.

Sedangkan Partai Matahari Bangsa (PMB)²⁹ yang dideklarasikan di pusatnya Muhammadiyah, yakni Yogyakarta (Jogjakarta Expo Center – JEC) pada tanggal 16 Desember 2007,³⁰ dihadiri oleh mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Ma’arif,

²⁸ Sebelum nama PAN menjadi pilihan sebagai nama partai yang didirikan, rencana semula nama partainya adalah PAB (Partai Amanat Bangsa) – yang diplesetkan menjadi Partai Amin Bingung – waktu yang dipilih untuk mendeklarasikan semula tanggal 17 Agustus 1998, kemudian diundur menjadi 23 Agustus 1998. Ketetapan untuk mendirikan partai baru telah bulat, yang sebelumnya ada tawaran untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan kedudukan yang cukup strategis sebagai ketua dewan pakar. Namun rencana PPP itu sendiri secara internal tidak bulat, karena ada beberapa pimpinan yang tidak sependapat, misalnya Djufrie dengan alasan belum dibicarakan dalam rapat resmi DPP. Alasan Djufrie ini ditolak oleh Hasan Ismail Metarium yang akrab dipanggil Buya Ismail, bahwa keputusan merekrut Amin merupakan amanat Musyawarah Kerja Nasional, dan sudah pula disampaikan dalam rapat DPP PPP tanggal 5 Agustus 1998. Memang Amien pernah menandatangani kesediaannya duduk di dewan pakar PPP sewaktu berada di Bandara Soekarno Hatta, namun diakui sendiri bahwa penandatanganan itu tidak mengikat, dengan sendirinya tidak berlaku kalau dirinya menjadi ketua partai politik yang baru. Lihat *Ummat*, No. 7 Tahun IV, 24 Agustus 1998. *Kompas*, Senin 10 Agustus 1998.

²⁹ Secara embrional lahirnya Partai Matahari Bangsa adalah berawal dari Perhimpunan Amanat Muhammadiyah (PAM) oleh Abdul Mu’ti, ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dideklarasikan pada tanggal 9 Maret 2003 di Jakarta. Dikatakan, bahwa PAM ini nantinya memiliki hubungan koordinatif dengan Muhammadiyah. Lihat Tarmizi Taher, Muhammadiyah dan Politik Kebangsaan, dalam *Sinar Harapan*, 12 Maret 2003, hlm. 4. Kelahiran PAM menuai pro dan kontra, bahkan ada yang secara sinis menyatakan bahwa PAM itu singkatan Partai Abdul Mu’ti, hal ini disampaikan sendiri oleh Abdul Mu’ti dalam Seminar Nasional tentang “Muhammadiyah Masa Depan: Profil Pemimpin Dan Kebijakan Politik” di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu 18 Juni 2005.

³⁰ *Soft Launching* telah dilakukan di Jakarta pada hari Senin 11 Desember 2006, insiator pendiri PMB, Imam Addaruqutni, mantan Ketua Umum Pimpinan Pemuda Muhammadiyah mengatakan bahwa partai ini didedikasikan untuk warga Muhammadiyah dan membawa suara Muhammadiyah di pentas politik nasional. Lihat <http://www.pmb.or.id>.

dan salah seorang ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, K.H. Muhammad Muqoddas, Lc., MA. Kedua tokoh Muhammadiyah ini tidak hanya sekedar datang menyaksikan gebyarnya acara deklarasi, melainkan mempunyai peran strategis, dan memberikan dorongan moral dengan memberikan orasi dan *taushiyahnya*. KH. Muhammad Muqaddas dalam *taushiyah* politik menyampaikan 6 langkah yang dapat dijadikan sebagai pedoman warga Partai Matahari Bangsa dalam mewujudkan kehidupan politik yang bermoral dan Islami, yakni (1) warga PMB perlu mengambil bagian dalam kehidupan politik lewat berbagai saluran secara positif sebagai wujud mu'amalah dengan prinsip-prinsip akhlak Islami dengan tujuan membangun masyarakat utama yang diridhai Allah swt. (2) menegakkan dengan sejujurnya dan sungguh-sungguh prinsip-

prinsip dalam berpolitik; (3) berpolitik demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan sesama, mengutamakan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit; (4) politisi PMB berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, fitnah, fasad dan hanya mementingkan diri sendiri; (5) berpolitik dengan kesalehan, sikap positif dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat utama dengan fungsi amar ma'ruf nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh; dan (6) menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakan oleh politisi PMB secara cerdas dan dewasa.³¹

³¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa prinsip-prinsip dalam berpolitik praktis adalah (1) menunaikan amanah (Q.S.al-Nisa'/4:58), dan tidak boleh mengkhianati amanah (Q.S.al-Anfal/8:27); (2) menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran (Q.S. al-Nisa'/4:58); (3) ketaatan kepada pimpinan yang sejalan dengan perintah Allah dan Rasul (Q.S.al-Nisa'/4: 59, al-Hasyr/59:18); (4) mengemban risalah Islam (Q.S. al-Anbiya'/21: 107); (5) menunaikan amar makruf nahi munkar dan mengajak orang untuk beriman kepad Allah (Q.S. Ali-Imran/3: 104, 110); (6) mempedomani al-Qur'an dan al-Sunnah (Q.S. al-Nisa'/4: 108); (7) mementingkan persatuan dan persaudaraan umat manusia (Q.S.al-Hujurat/49: 13); (8) menghormati kebebasan orang lain (Q.S.al-Balad/90: 13); (9) menjauhi fitnah dan kerusakan (Q.S.al-Hasyr/59: 9); (10) menghormati hak hidup orang lain (Q.S. al-An'am/6: 151); (11) tidak berkhianat dan melakukan kezaliman (Q.S.al-Furqan/25: 19, al-Anfal/8: 27); (12) tidak mengambil hak orang lain (Q.S.al-Maidah/5: 38); (13) berlomba dan bekerja dalam kebaikan (Q.S. al-Baqarah/2: 148); (14) ketaqwaan, tidak bekerja atau melakukan konspirasi dalam dosa dan permusuhan (Q.S.al-Maidah/5: 2); (15) memelihara hubungan baik antara pimpinan dan warga (Q.S.al-Nisa'/4: 57-58); (16) memelihara keselamatan umum (Q.S. al-Taubah/9: 128) ; hidup berdampingan dengan baik dan damai (Q.S.al-Mumtahanah/60: 8); (17) tidak melakukan fasad dan kemunkaran (Q.S. Ali-Imran/3: 104, al-Qashash/28: 77); (18) dan mementingkan ukhuwah Islamiyah (Q.S. Ali-Imran/3: 103). Lihat <http://www.pmb.co.id>

Kalau ditarik ke belakang, PMB lahir karena mendapatkan rekomendasi dari Sidang Tanwir Muhammadiyah di Mataram pada tahun 2004, pada point 10 (masalah persyarikatan) bahwa "berkaitan dengan dinamika politik internal dalam Muhammadiyah pasca pemilu 2004, Tanwir dapat menangkap dan mencatat munculnya keinginan atau inspirasi warga Muhammadiyah terutama dari Angkatan Muda Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik baru. Tanwir berpandangan bahwa gagasan tersebut hendaknya dipertimbangkan secara lebih matang dan tidak terburu-buru, karena pendirian partai politik baru harus didasarkan pada pemikiran yang mendalam dan bukan karena alasan kekecewaan atau sekedar keinginan untuk memperebutkan kursi kekuasaan politik. Tanwir memberi kesempatan kepada Angkatan Muda Muhammadiyah untuk menindak lanjuti dan mengkaji gagasan tersebut secara lebih komprehensif dengan selalu memperhatikan nilai-nilai dasar persyarikatan dan tidak menyeret Muhammadiyah dalam politik praktis".

Dari isi rekomendasi tersebut, sangatlah jelas bahwa Sidang Tanwir memberikan mandat penuh kepada Angkatan Muda Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik baru, dengan catatan tidak menyeret dan membawa nama

besar Muhammadiyah terjun dalam politik praktis. Namun secara normatif Muhammadiyah tetap bermain di wilayah *high politics*, politik kebudayaan dan kebangsaan dan keummatan.

Dalam perkembangan terakhir, terutama setelah gagalnya Amien Rais dalam pemilu tahun 2004, kedekatan Muhammadiyah dengan partai politik yang direkomendasikan dari tanwir Muhammadiyah, dicandra sudah mulai kendor setelah PAN dinakhodai oleh Sutrisno Bachir, lebih-lebih setelah Ketua Umumnya Hatta Rajasa. Sementara dengan PMB juga mulai kendor setelah tidak lolos ke senayan, walaupun saat berdiri sampai menjelang pemilu legislatif dicandra ada tingkat kedekatannya semakin akrab, dengan bukti Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, membuka Rapat Koordinasi PMB ke III di Jakarta pada hari senin, 21 April 2008. Ini adalah langkah politiknya yang kongkrit dan merupakan wujud dukungan terhadap PMB, karena selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru pertama kali ini membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) partai politik.³²

Dengan demikian semakin jelaslah ambiguitas Muhammadiyah dalam berpolitik, hal ini apakah menjadi kekuatan tersendiri bagi Muhammadiyah atau kelemahan

³² Lihat *Kompas*, Selasa 22 April 2008. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jalur Muhammadiyah adalah gerakan kultural yang menjalankan politik peradaban, bukan politik praktis. Karena itu, Muhammadiyah tidak dapat memberikan dukungan politik bagi PMB.

(ketidakberdayaan) dalam menghadapi realitas kebangsaan dan kenegaraan yang berkembang di Indonesia? Paling tidak menjadi pelajaran bagi Muhammadiyah bahwa kedekatan dengan partai politik, tidak memberikan dampak positif bagi Muhammadiyah, malah kadang-kadang Muhammadiyah hanya sekedar dijadikan kendaraan politik bagi aktor-aktor tertentu untuk meraih kekuasaan berupa kursi parlemen. Bisa jadi setelah kursi didapatkan, mereka melupakan persyarikatan, akan ingat kembali kalau pemilihan umum tiba dan berkeinginan untuk mendapatkan kursi.

Walaupun PAN dan PMB lahir dari rekomendasi tanwir, namun dalam meletakkan dasar-dasar partai ada perbedaan yang menyolok, PAN berasaskan Pancasila dan sifatnya terbuka dan mandiri, sementara PMB berasaskan Islam. Asas merupakan ideologi partai yang memberikan landasan perjuangan mewujudkan tujuan partai itu sendiri, yang ini jelas berbeda dengan partai yang dasarnya non agama. Partai berdasarkan agama dengan sendirinya memberikan tafsiran ideologis terhadap kenyataan dan persoalan politik berbeda dengan partai yang berideologi

sekuler.³³ Padahal ideologi adalah suatu sistem kepercayaan yang memuat nilai-nilai dan ide-ide yang di organisasi secara rapi sebagai basis filsafat, sains, program sosial ekonomi politik, yang menjadi pandangan hidup, aturan berpikir, merasa dan bertindak individu atau kelompok. Ideologi adalah pembimbing bagi tindakan politik yang diyakini dan diperjuangkan, dan ini merupakan identitas dari suatu partai politik.³⁴ Kedua partai ini belum teruji dalam berpegang teguh ideologi Muhammadiyah, padahal mengandalkan suara dari warga Muhammadiyah.

KONSTRUKSI IDEAL

Ada tiga hubungan Islam dan politik, adalah; *pertama*, hubungan sekularistik, yakni antara Islam dan politik dua wilayah yang berbeda dan terpisah secara demarkasi. Islam adalah *ritual system* yang hanya berorientasi keakhiratan, bersifat sakral dan individual. Sedangkan politik adalah *power system*, yakni sistem kekuasaan yang berorientasi keduniaan, bersifat profan dan sosial. *Kedua*, hubungan integralistik, yakni antara Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan, karena Islam itu

³³ Daniel Dhakidae, Partai-partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-patahan Sejarah, dalam Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program 1999*. Jakarta: Kompas, 1999, hlm. 40.

³⁴ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Yogyakarta: Qalam, 2004, hlm. 9. Lebih lanjut dikatakan bahwa ideologi dapat mengarahkan dalam menentukan kebijakan yang harus diraih, menentukan siapa kawan dan lawan, dan menjelaskan mengapa kepercayaan yang berbeda dengan kepercayaan kita itu adalah berbahaya.

agama yang sempurna yang mengatur kehidupan umat manusia termasuk kehidupan politik. Orang terjun ke bidang politik itu merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam, apalagi manusia secara fitrah tidak dapat dilepaskan dari politik. Ajaran Islam tentang politik telah jelas, dan Rasulullah saw memberikan contoh sewaktu membangun negara Madinah, maka mendirikan negara Islam juga bagian dari ajaran Islam, bahkan Islam harus diformalkan dalam negara. *Ketiga*, hubungan mutualis simbiotik, artinya antara Islam dan politik ada hubungannya walaupun tidak sama persis. Secara prinsip dan etik Islam memberikan rambu-rambu dalam berpolitik, maka siapa pun yang terjun ke wilayah politik dalam rangka untuk meraih kekuasaan, tetap harus dalam bingkai ajaran Islam. Kekuasaan itu sah-sah saja diraih, tetapi untuk mendapatkan tetap memakai etika politik Islam yang berdasarkan al-Quir'an dan as-Sunnah al-Maqbulah.

Dari ketiga pola hubungan Islam dan politik di atas, maka Muhammadiyah lebih condong pada pola hubungan yang ketiga, yakni dalam berpolitik tetap harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan etika Islam, sehingga wajah dan perilaku politisi muslim dan atau politisi Muhammadiyah berbeda dengan yang lain. Kalau perilaku politisi muslim sama dengan perilaku politisi non-muslim, lantas apa yang membedakan?. Begitu juga partai politik yang berbasas Islam, perilaku politisinya tidak jauh beda dengan politisi

partai politik yang berbasas non-Islam, lantas apa yang membedakan?

Untuk itulah dalam Muhammadiyah diperlukan ada kelompok pemikir (*think tank*) yang mengkaji secara komprehensif tentang politik dan perkembangannya di Indonesia. Hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan bagi para politisi Muhammadiyah khususnya dan politisi muslim pada umumnya, dalam merespon dan memberikan solusi dari setiap persoalan bangsa. Kesimpulan hasil kajian dari *think tank* ini dapat juga dimanfaatkan oleh Pimpinan Muhammadiyah, karena pola kepemimpinan Muhammadiyah itu bersifat kolegal, sehingga diharapkan tidak mengeluarkan statement politik yang hanya berdasarkan pemikiran pribadinya, yang lantas diatas namakan Muhammadiyah.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah waktunya perlu menata ulang relasi Muhammadiyah dengan politik, agar eksistensi Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil* Islam Indonesia semakin kokoh dalam memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara.

1. Sesuai dengan Khittah Ujung Pandang, Surabaya dan Denpasar, Muhammadiyah tetap tidak memiliki hubungan organisatoris dengan semua partai politik. Sikap netralitas ini menjadikan Muhammadiyah memiliki daya tawar yang tinggi dihadapan kekuatan politik, selain itu Muhammadiyah lebih terfokus mengembangkan amal usahanya. Netralitas Muhammadiyah ini

demokrasi keutuhan warganya, karena kalau sudah terjun ke politik praktis, tidak dapat dihindarkan terjadinya konflik. Khittah ini masih relevan, maka harus tetap dijaga dan dipatuhi oleh pimpinan dan warga Muhammadiyah.

2. Muhammadiyah harus meletakkan dirinya sebagai kekuatan moral, dengan leluasa menjalankan fungsi kultural untuk melancarkan dakwah amar makruf nahi munkar kepada siapapun dan lembaga politik manapun. Oleh karena itu moralitas pimpinan dan warga Muhammadiyah harus sebagai teladan bagi yang lain.
3. Muhammadiyah memantapkan dirinya sebagai *civil* Islam untuk menjadi penyeimbang kekuatan lembaga tinggi negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh negara harus diawasi dan dikoreksi secara cermat. Fungsi ini harus dijalankan oleh Muhammadiyah bersama organisasi lain yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap *good governance*. Korupsi yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara, mafia markus yang begitu transparan dilakukan oleh para penegak hukum, dan bentuk penyelewengan lainnya tidak boleh dibiarkan. Fungsi dakwah harus lebih diefektifkan.
4. Pimpinan Muhammadiyah di segala jenjangnya tetap harus memiliki kearifan lokal, untuk tetap mendukung kebijakan

pemerintah daerah yang mengarah pada percepatan tujuan Muhammadiyah.

5. Dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah idealnya sebagai kelompok kepentingan (*interest group*). Bukan kelompok kepentingan untuk meraih kekuasaan, tetapi kelompok kepentingan untuk memperjuangkan tercapainya tujuan persyarikatan.

PENUTUP

Muhammadiyah memiliki dinamika yang menarik dalam menapaki sejarahnya sejak berdiri hingga sekarang ini. Dinamika dalam memainkan perannya sebagai organisasi Islam dalam kancah kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, sehingga tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa Muhammadiyah telah teruji oleh zaman. Usia Muhammadiyah lebih tua dari umur Republik Indonesia, namun tetap konsisten sebagai gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan gerakan tajdid. Identitas Muhammadiyah inilah yang membedakan dengan *al-harakah al-Islamiyah* atau *Islamic movement* lainnya, baik gerakan Islam yang datang dari luar negeri maupun yang berdiri dan didirikan oleh umat Islam Indonesia sendiri.

Eksistensi Muhammadiyah untuk masa yang akan datang sangat tergantung pada konsistensinya memegang teguh identitas dan tujuannya.